



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Panji No. 158 Kepanjen, Malang Telp. (0341) 392024
email : sekda@malangkab.go.id - Website : <http://www.malangkab.go.id>
KEPANJEN – 65163

PENGUMUMAN
NOMOR : 800.1.2.2/9751 /35.07.405/2023
TENTANG
PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Malang membuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Republik Indonesia yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk menjadi Calon Aparatur Sipil Negara, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 654 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023;
13. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini. Seluruh **PELAMAR WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023.

II. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

Formasi Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebanyak **2.786 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh enam)** formasi PPPK dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah alokasi formasi untuk Tenaga Guru sebanyak **1.982** formasi;
2. Jumlah alokasi formasi untuk Tenaga Kesehatan sebanyak **446** formasi;
3. Jumlah alokasi formasi untuk Tenaga Teknis sebanyak **358** formasi.

Rincian formasi jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

III. PERSYARATAN UMUM

1. Pelamar merupakan Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Usia pelamar :
 - a. Untuk Jabatan Fungsional Guru paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
 - b. Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, khusus pelamar disabilitas harus memenuhi persyaratan tambahan yang telah ditentukan;
9. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Calon PPPK, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan/memiliki ketergantungan terhadap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
11. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
12. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
13. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar;
14. Masih aktif bekerja sampai dengan saat ini;
15. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi daerah dan 1 (satu) kebutuhan jabatan;
16. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan, menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, maka pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Proses pendaftaran dilakukan secara *online* melalui SSCASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses mengunggah dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik;
18. Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk Formasi PPPK dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah;
19. Mengimplementasikan penggunaan meterai elektronik (e-meterai) yang terintegrasi antara SSCASN dengan PERUM PERURI dalam pembubuhan meterainya dan pembubuhan meterai elektronik dapat dilakukan pada SSCASN ataupun *website* distributor atau *website* Mitra Distributor setelah dilakukan pembelian;
20. Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara.

IV. PERSYARATAN KHUSUS

Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK terdiri atas:

A. PELAMAR PPPK JABATAN FUNGSIONAL GURU

1. Jenis Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Guru terdiri dari :

- a. Pelamar Kebutuhan Khusus dengan kriteria :

- a) Pelamar Prioritas, peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada Seleksi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya;

- b) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara; dan
 - c) Guru Non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.
- b. Pelamar Kebutuhan Umum dengan kriteria :
- a) Lulusan Pendidikan Profesional Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (*database*) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
 - b) Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
2. Pelamar pada seleksi PPPK JF guru tahun anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.
3. Dalam hal pelamar seleksi PPPK JF Guru tahun anggaran 2023 berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;
 - b. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan; dan
 - c. Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan.
- B. PELAMAR PPPK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DAN TEKNIS**
1. Jenis Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan dan Teknis terdiri dari:
- a. Pelamar khusus meliputi :
 - 1) Eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar;
 - 2) Tenaga Non ASN yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.
 - b. Pelamar umum meliputi :

Tenaga kerja diluar pelamar khusus yang memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
2. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama;
 - b. paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda.
3. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) bukan *internship* sesuai Jabatan yang dilamar (Ketentuan dapat dilihat pada Kepmen PAN RB Nomor 654 Tahun 2023).

4. Pelamar wajib memenuhi persyaratan tambahan apabila melamar pada jabatan sebagai berikut :
 - a. Ahli Pertama - Analis Kebakaran :
 1. Surat Keterangan Sehat;
 2. Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas.
 - b. Pemula - Pemadam Kebakaran :
 1. Surat Keterangan Sehat;
 2. Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas.
 - c. Pemula - Pranata Pencarian dan Pertolongan
 1. Persyaratan Administrasi.
 - a) Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas
 - b) Surat Keterangan Bukan Buta Warna yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah
 - c) Surat Keterangan Sehat dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah
 - d) usia 41-50 tahun dengan pengalaman 5-10 tahun dan memiliki minimal 10 kompetensi SAR (diutamakan sertifikat LSP Basarnas) yang diverifikasi Basarnas
 - e) usia 36-40 tahun dengan pengalaman 3-5 tahun dan memiliki minimal 5 kompetensi SAR (diutamakan sertifikat LSP Basarnas) yang diverifikasi Basarnas
 - f) usia 20-35 tahun dengan pengalaman minimal 2 tahun dan memiliki minimal 1 kompetensi SAR (diutamakan sertifikat LSP Basarnas) yang diverifikasi Basarnas
 2. Lulus Pemeriksaan Kesehatan
Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan di rumah sakit pemerintah dengan supervisi Basarnas.
Pemeriksaan kesehatan meliputi:
 - a) Tinggi badan minimum peserta perempuan 157 cm dan laki-laki 163 cm
 - b) Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan rentang nilai 18 s.d 26
 3. Lulus Tes Kesemaptaan
Tes kesemaptaan dilaksanakan dengan menggunakan standar yang ditetapkan oleh Basarnas. Nilai minimum tes kesemaptaan adalah 40.
Tes kesemaptaan meliputi:
 - a) Tes samapta A yang berupa lari 2.400 meter
 - b) Tes samapta B yang berupa:
 - 1) Push up 1 menit
 - 2) Sit up 1 menit
 - 3) Pull up 1 menit
 - 4) Lulus Tes kemampuan berenang sejauh 50 meter
5. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan dan Teknis dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana disebutkan di atas dan ditambah dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
 - b. pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibuktikan dengan:
 - 1) dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan

- 2) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

V. JADWAL PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

Catatan : Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Panselnas, selalu cek pengumuman terbaru pada laman <https://bkpsdm.malangkab.go.id/website/InfoCASN> dan <https://sscasn.bkn.go.id>.

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Semua pendaftaran dilaksanakan melalui SSCASN dan tidak ada pengiriman berkas fisik kepada Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Malang;
2. Pelamaran lowongan kebutuhan PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2023 didahulukan secara berurutan bagi :
 - a. pelamar prioritas;
 - b. eks THK-II;
 - c. guru non ASN di sekolah negeri; dan
 - d. pelamar pada kebutuhan umum.

3. Pelamaran dilakukan secara daring melalui SSCASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pelamar wajib memiliki alamat *email* yang aktif untuk mengikuti proses pendaftaran seleksi Pengadaan;
 - 2) Selanjutnya pelamar dapat melakukan registrasi pembuatan akun baru, kemudian login dan mengisi data diri sesuai prosedur pendaftaran pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - 3) Pelamar hanya dapat membuat akun sebanyak 1 (satu) kali;
 - 4) Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - 5) Pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagai berikut :
 - a. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Malang di Kepanjen, diketik menggunakan komputer, bermaterai elektronik/e-meterai senilai Rp.10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam;
 - b. KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
 - c. Pas foto berwarna terbaru, tampak depan, berpakaian formal dengan latar belakang warna merah polos, posisi *portrait*, dengan rasio 3 x 4. Pas foto bukan hasil *editing*, tidak dipercantik karena akan dicocokkan dengan *camera face recognition* pada saat Seleksi Kompetensi. Ketidakcocokan wajah dengan pas foto hasil upload pada saat *face recognition* dapat menyebabkan peserta tidak diperbolehkan mengikuti ujian;
 - d. Ijazah asli (bukan Surat Keterangan Lulus) sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau surat penyetaraan ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri jenjang S-1/D-IV; Tambahan khusus untuk :
 - 1) Pendidikan Profesi : melampirkan ijazah S-1 dan Profesi;
 - 2) Pendidikan Dokter Spesialis : melampirkan Ijazah S-1, Profesi, dan Spesialis;
 - 3) Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
 - e. Transkrip nilai asli (bukan Transkrip Nilai Sementara) sesuai dengan jabatan yang dilamar; Tambahan khusus untuk :
 - 1) Pendidikan Profesi : melampirkan Transkrip Nilai S-1 dan Profesi; dan
 - 2) Pendidikan Dokter Spesialis : Transkrip Nilai S-1, Profesi, dan Spesialis.
 - f. Surat Pernyataan 5 (lima) poin bermaterai elektronik/e-meterai senilai Rp.10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam;
 - g. Surat Pernyataan Tidak Pindah Selama Masa Hubungan Perjanjian Kerja bermaterai elektronik/e-meterai senilai Rp.10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam;
 - h. Surat Tanda Registrasi (STR) asli bukan STR *Internship* yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang bagi tenaga kesehatan sesuai dengan keahliannya;
 - i. Persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis bagi pelamar yang melamar pada jabatan yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023;

- j. Sertifikat pendidik asli bagi tenaga guru yang memiliki;
- k. Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan j ditambah dengan:
 - 1) Surat keterangan asli dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas, yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya; dan
 - 2) link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamar.

Catatan :

- Dokumen yang dipindai (di-*scan*) berwarna merupakan dokumen asli (bukan dokumen foto kopi);
- Ukuran, bentuk dan isi file yang diunggah menyesuaikan keterangan dan kolom pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- Format Surat Lamaran, Surat Pernyataan dan Surat Keterangan dapat diunduh pada <https://bkpsdm.malangkab.go.id/website/InfoCASN>;
- Surat Pernyataan 5 (lima) poin dan Surat Pernyataan Tidak Pindah Selama Masa Hubungan Perjanjian Kerja dijadikan satu *file scan* dan diunggah dalam satu menu "Surat Pernyataan 5 Poin";
- Dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tidak terbaca dengan jelas dinyatakan gugur seleksi administrasi;
- Data identitas diri, seperti nama, tempat dan tanggal lahir pada KTP harus sesuai dengan ijazah, transkrip nilai dan dokumen lainnya.

VII. MASA HUBUNGAN KERJA PPPK

Masa hubungan kerja PPPK 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan:

- a. tersedia formasi kebutuhan PPPK;
- b. penilaian kinerja minimal bernilai "baik"; dan
- c. ketersediaan anggaran untuk gaji dan tunjangan PPPK.

VIII. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi Pengadaan PPPK terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu :

1. Seleksi Administrasi
 - a. Seleksi administrasi berdasarkan dokumen pelamar yang telah diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Seleksi Kompetensi
Seleksi Kompetensi terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosiokultural, dan wawancara dilaksanakan dengan menggunakan *Sistem Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN)

IX. KETENTUAN TENTANG PENAMBAHAN NILAI

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 terdapat sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada jabatan :

1. Ahli Pertama - Analisis Kebakaran
2. Ahli Pertama - Analisis Kebijakan
3. Ahli Pertama - Analisis Pasar Hasil Perikanan

4. Ahli Pertama - Pekerja Sosial
5. Ahli Pertama - Pembina Jasa Konstruksi
6. Ahli Pertama - Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
7. Ahli Pertama - Penata Kelola Jalan dan Jembatan
8. Ahli Pertama - Penata Kelola Penyehatan Lingkungan
9. Ahli Pertama - Penata Kelola Perumahan
10. Ahli Pertama - Pengawas Kemetriologi
11. Ahli Pertama - Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
12. Ahli Pertama - Penyuluh Pertanian
13. Ahli Pertama - Penyuluh Sosial
14. Terampil - Penata Laksana Jalan dan Jembatan
15. Pemula - Pemadam Kebakaran
16. Pemula - Penata Laksana Jalan dan Jembatan
17. Pemula - Penata Laksana Penyehatan Lingkungan

X. MASA SANGGAH

Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi. Penjelasan tentang masa sanggah sebagai berikut :

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
4. Dalam hal alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Pada masa sanggah tidak diberikan kesempatan kepada pelamar untuk mengunggah ulang dokumen apabila ada kekeliruan/kekurang-lengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

XI. HELP DESK

Layanan informasi permasalahan pendaftaran di SSCASN dapat disampaikan melalui layanan *helpdesk* Badan Kepegawaian Negara pada laman <https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id> atau melalui akun media sosial Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang.

XII. LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023, **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
2. Pemerintah Kabupaten Malang menghimbau agar pelamar tidak melayani tawaran-tawaran dan tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu/ oknum yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. Pemerintah Kabupaten Malang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari orang/pihak tertentu/oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi;
4. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.malangkab.go.id/website/InfoCASN>.

Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;

5. Dalam hal peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan nomor induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK), maka Pemerintah Kabupaten Malang berhak membatalkan status kepegawaiannya, dan menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana kepada pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
6. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 **tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak**;
7. Informasi lainnya berkaitan dengan Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 disampaikan melalui :
 - a. Instagram : @bkpsdmmalangkab
 - b. Twitter : @bkpsdmmalangkab
 - c. Facebook : Bkpsdm Malangkab
 - d. Email : bkpsdm@malangkab.go.id

Panitia Seleksi **tidak membuka layanan melalui tatap muka, telepon, whatsapp, telegram atau media lainnya** selain yang disebutkan di atas.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Kapanjen
Pada Tanggal : 19 SEP 2023

a.n. **BUPATI MALANG**
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah,



Dr. Ir. WAHYU HIDAYAT, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 196612171993031006

LAMPIRAN PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MALANG TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : 800.1.2.2/9751/35.07.405/2023

TANGGAL : 19 SEP 2023

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA GURU

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA BUDHA	3	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG	
2	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA HINDU	3	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG	
3	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	774	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG	
4	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG	Khusus Disabilitas
5	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	73	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG	
6	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	71	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG	
7	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	19	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG	
8	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG	Khusus Disabilitas
9	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	19	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG	
10	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	74	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG	
11	AHLI PERTAMA - GURU IPA	7	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG	
12	AHLI PERTAMA - GURU IPS	9	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG	
13	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	404	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG	
14	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	20	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG	Khusus Disabilitas
15	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	37	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG	
16	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	252	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG	
17	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	41	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG	
18	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRUSAHAAN	36	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG	
19	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRUSAHAAN	5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG	Khusus Disabilitas
20	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	39	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG	
21	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG	Khusus Disabilitas
22	AHLI PERTAMA - GURU TIK	81	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG	
		1982		

Catatan :

Kualifikasi Pendidikan bagi Tenaga Guru merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023

TENAGA KESEHATAN

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	JENIS	
				UMUM	KHUSUS
1	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1	RSUD LAWANG		1
2	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1	RSUD NGANTANG	1	
3	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	RSUD NGANTANG	1	
4	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	RSUD LAWANG		1
5	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	1	RSUD KANJURUHAN KEPANJEN		1
6	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH ANAK	1	RSUD KANJURUHAN KEPANJEN		1
7	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIS	1	RSUD KANJURUHAN KEPANJEN	1	
8	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	1	RSUD KANJURUHAN KEPANJEN		1
9	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI	1	RSUD KANJURUHAN KEPANJEN		1
10	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	RSUD NGANTANG	1	
11	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI	2	RSUD KANJURUHAN KEPANJEN		2
12	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1	RSUD NGANTANG	1	
13	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	RSUD NGANTANG	1	
14	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	RSUD KANJURUHAN KEPANJEN		1 *)
15	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	RSUD LAWANG		1
16	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	RSUD NGANTANG	1	
17	AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS ANAK-HEMATOLOGI ONKOLOGI	1	RSUD KANJURUHAN KEPANJEN	1	
18	AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS BEDAH-BEDAH ONKOLOGI	1	RSUD KANJURUHAN KEPANJEN	1	
19	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	2	DINAS KESEHATAN KAB. MALANG		2
20	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	PUSKESMAS SITIARJO		1
21	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	PUSKESMAS KALIPARE		1
22	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON		1
23	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	PUSKESMAS WONOKERTO		1
24	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	PUSKESMAS GEDANGAN		1
25	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN		1
26	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	PUSKESMAS AMPELGADING		1
27	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	PUSKESMAS PONCOKUSUMO		1
28	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	PUSKESMAS BULULAWANG		1
29	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	PUSKESMAS KETAWANG		1
30	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	PUSKESMAS KROMENGAN		1
31	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	PUSKESMAS NGAJUM		1
32	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	PUSKESMAS TUMPANG		1
33	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	PUSKESMAS JABUNG		1
34	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	PUSKESMAS SINGOSARI		1
35	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	PUSKESMAS ARDIMULYO		1
36	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	PUSKESMAS KARANGPLOSO		1
37	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	PUSKESMAS DAU		1
38	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	PUSKESMAS PUJON		1
39	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	PUSKESMAS NGANTANG		1
40	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	PUSKESMAS KASEMBON		1
41	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	PUSKESMAS DONOMULYO		1
42	AHLI PERTAMA - APOTEKER	3	RSUD KANJURUHAN KEPANJEN	1	2
43	AHLI PERTAMA - APOTEKER	5	RSUD LAWANG	1	4
44	AHLI PERTAMA - APOTEKER	2	RSUD NGANTANG	1	1
45	AHLI PERTAMA - BIDAN	2	RSUD LAWANG		2
46	AHLI PERTAMA - BIDAN	3	RSUD NGANTANG		3
47	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	PUSKESMAS KALIPARE	2	
48	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	2	
49	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	PUSKESMAS WONOKERTO	1	
50	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	PUSKESMAS GEDANGAN	1	
51	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	PUSKESMAS SITIARJO	1	1
52	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	PUSKESMAS DAMPIT		1
53	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	PUSKESMAS PAMOTAN	1	1
54	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	PUSKESMAS TIRTOYUDO	1	1
55	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	PUSKESMAS AMPELGADING	2	
56	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	PUSKESMAS PONCOKUSUMO		1
57	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	PUSKESMAS WAJAK		1
58	AHLI PERTAMA - DOKTER	3	PUSKESMAS TUREN	1 *)	2
59	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	PUSKESMAS BULULAWANG		2
60	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	PUSKESMAS KETAWANG		1
61	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	UPT PUSKESMAS PAGELARAN		2

TENAGA KESEHATAN

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	JENIS	
				UMUM	KHUSUS
62	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	PUSKESMAS KEPANJEN	1	1
63	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	PUSKESMAS SUMBERPUCUNG		1
64	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	PUSKESMAS KROMENGAN	1	
65	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	PUSKESMAS WONOSARI	1	
66	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	PUSKESMAS WAGIR		1
67	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	PUSKESMAS PAKISAJI	1	
68	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	PUSKESMAS PAKIS		1
69	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	PUSKESMAS JABUNG	1	1
70	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	PUSKESMAS LAWANG		1
71	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	PUSKESMAS SINGOSARI		1
72	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	PUSKESMAS ARDIMULYO		1
73	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	PUSKESMAS KARANGPLOSO		1
74	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	PUSKESMAS PUJON	1	
75	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	PUSKESMAS NGANTANG	1	1
76	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	PUSKESMAS KASEMBON	1	
77	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	RSUD KANJURUHAN KEPANJEN		2
78	AHLI PERTAMA - DOKTER	6	RSUD NGANTANG	4	2
79	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	PUSKESMAS BULULAWANG		1
80	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	PUSKESMAS GONDANGLEGI	1	
81	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	PUSKESMAS PAKIS		1 *)
82	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	PUSKESMAS NGANTANG	1	
83	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	PUSKESMAS KASEMBON	1	
84	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	2	DINAS KESEHATAN KAB. MALANG	1	1
85	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	PUSKESMAS GEDANGAN	1	
86	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	PUSKESMAS SITIARJO	1	
87	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	PUSKESMAS SITIARJO		1
88	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	PUSKESMAS PAKIS		1
89	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	2	RSUD LAWANG		2
90	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	4	RSUD KANJURUHAN KEPANJEN	4	
91	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	2	RSUD NGANTANG	2	
92	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	2	RSUD LAWANG	2	
93	AHLI PERTAMA - PERAWAT	6	RSUD KANJURUHAN KEPANJEN		6
94	AHLI PERTAMA - PERAWAT	17	RSUD LAWANG		17
95	AHLI PERTAMA - PERAWAT	15	RSUD NGANTANG		15
96	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	LAB. KES DAERAH KAB. MALANG		1
97	AHLI PERTAMA - TEKNISI ELEKTROMEDIS	2	FASYANKES LAINNYA UPT PENGUJIAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN	1 *)	1
98	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	PUSKESMAS KALIPARE	1	
99	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	1	
100	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	PUSKESMAS GEDANGAN	1	
101	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	1	
102	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	PUSKESMAS PAMOTAN	1	
103	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	UPT PUSKESMAS PAGELARAN		1
104	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	PUSKESMAS SUMBERPUCUNG		1
105	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	PUSKESMAS WONOSARI		1
106	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	PUSKESMAS TUMPANG	1	
107	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	PUSKESMAS LAWANG	1	
108	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	PUSKESMAS KARANGPLOSO	1	
109	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	PUSKESMAS PUJON	1	
110	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	PUSKESMAS JABUNG		1
111	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	PUSKESMAS BANTUR		1
112	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	PUSKESMAS GEDANGAN		1
113	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	PUSKESMAS DAMPIT		1
114	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	PUSKESMAS WAJAK	1	
115	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	PUSKESMAS WONOSARI	1	
116	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	PUSKESMAS PAKISAJI		1
117	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	PUSKESMAS TAJINAN	1	

TENAGA KESEHATAN

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	JENIS	
				UMUM	KHUSUS
118	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	PUSKESMAS SINGOSARI		1
119	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	PUSKESMAS KASEMBON	1	
120	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	3	RSUD KANJURUHAN KEPANJEN	2	1
121	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	4	RSUD NGANTANG	4	
122	TERAMPIL - BIDAN	1	PUSKESMAS KALIPARE		1
123	TERAMPIL - BIDAN	1	PUSKESMAS PAGAK		1
124	TERAMPIL - BIDAN	2	PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON		2
125	TERAMPIL - BIDAN	2	PUSKESMAS BANTUR		2
126	TERAMPIL - BIDAN	2	PUSKESMAS WONOKERTO		2
127	TERAMPIL - BIDAN	2	PUSKESMAS GEDANGAN		2
128	TERAMPIL - BIDAN	2	PUSKESMAS SITIARJO		2
129	TERAMPIL - BIDAN	2	PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN		2
130	TERAMPIL - BIDAN	1	PUSKESMAS DAMPIT		1
131	TERAMPIL - BIDAN	1	PUSKESMAS PAMOTAN		1
132	TERAMPIL - BIDAN	2	PUSKESMAS TIRTOYUDO		2
133	TERAMPIL - BIDAN	2	PUSKESMAS AMPELGADING		2
134	TERAMPIL - BIDAN	1	PUSKESMAS PONCOKUSUMO		1
135	TERAMPIL - BIDAN	1	PUSKESMAS WAJAK		1
136	TERAMPIL - BIDAN	1	PUSKESMAS TUREN		1
137	TERAMPIL - BIDAN	1	PUSKESMAS BULULAWANG		1
138	TERAMPIL - BIDAN	1	PUSKESMAS GONDANGLEGI		1
139	TERAMPIL - BIDAN	1	PUSKESMAS KETAWANG		1
140	TERAMPIL - BIDAN	1	UPT PUSKESMAS PAGELARAN		1
141	TERAMPIL - BIDAN	1	PUSKESMAS SUMBERPUCUNG		1
142	TERAMPIL - BIDAN	1	PUSKESMAS KROMENGAN		1
143	TERAMPIL - BIDAN	1	PUSKESMAS NGAJUM		1
144	TERAMPIL - BIDAN	1	PUSKESMAS WONOSARI		1
145	TERAMPIL - BIDAN	1	PUSKESMAS WAGIR		1
146	TERAMPIL - BIDAN	1	PUSKESMAS PAKISAJI		1
147	TERAMPIL - BIDAN	2	PUSKESMAS TAJINAN		2
148	TERAMPIL - BIDAN	1	PUSKESMAS TUMPANG		1
149	TERAMPIL - BIDAN	1	PUSKESMAS PAKIS		1
150	TERAMPIL - BIDAN	1	PUSKESMAS JABUNG		1
151	TERAMPIL - BIDAN	1	PUSKESMAS LAWANG		1
152	TERAMPIL - BIDAN	1	PUSKESMAS SINGOSARI		1
153	TERAMPIL - BIDAN	1	PUSKESMAS ARDIMULYO		1
154	TERAMPIL - BIDAN	1	PUSKESMAS KARANGPLOSO		1
155	TERAMPIL - BIDAN	1	PUSKESMAS DAU		1
156	TERAMPIL - BIDAN	1	PUSKESMAS PUJON		1
157	TERAMPIL - BIDAN	3	PUSKESMAS NGANTANG		3
158	TERAMPIL - BIDAN	2	PUSKESMAS KASEMBON		2
159	TERAMPIL - BIDAN	2	RSUD KANJURUHAN KEPANJEN		2
160	TERAMPIL - BIDAN	6	RSUD LAWANG		6
161	TERAMPIL - BIDAN	6	RSUD NGANTANG		6
162	TERAMPIL - ENTOMOLOG KESEHATAN	2	DINAS KESEHATAN KAB. MALANG	2	
163	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	2	DINAS KESEHATAN KAB. MALANG		2
164	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	PUSKESMAS KALIPARE	1	
165	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	PUSKESMAS PAGAK	1	
166	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON		1
167	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	PUSKESMAS WONOKERTO	1	
168	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	PUSKESMAS GEDANGAN		1
169	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	1	
170	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	PUSKESMAS AMPELGADING		1
171	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	PUSKESMAS KETAWANG	1	
172	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	PUSKESMAS KROMENGAN		1
173	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	PUSKESMAS NGAJUM		1
174	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	PUSKESMAS WAGIR	1	
175	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	PUSKESMAS PAKISAJI	1 *)	
176	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	PUSKESMAS TUMPANG	1 *)	
177	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	PUSKESMAS LAWANG	1	
178	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	PUSKESMAS KASEMBON		1
179	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	RSUD NGANTANG	1	
180	TERAMPIL - OKUPASI TERAPIS	1	RSUD KANJURUHAN KEPANJEN	1	
181	TERAMPIL - PERAWAT	2	PUSKESMAS KALIPARE		2
182	TERAMPIL - PERAWAT	2	PUSKESMAS PAGAK		2
183	TERAMPIL - PERAWAT	1	PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON		1
184	TERAMPIL - PERAWAT	1	PUSKESMAS BANTUR		1
185	TERAMPIL - PERAWAT	1	PUSKESMAS WONOKERTO		1
186	TERAMPIL - PERAWAT	2	PUSKESMAS SITIARJO		2
187	TERAMPIL - PERAWAT	1	PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN		1

TENAGA KESEHATAN

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	JENIS	
				UMUM	KHUSUS
188	TERAMPIL - PERAWAT	3	PUSKESMAS DAMPIT		3
189	TERAMPIL - PERAWAT	2	PUSKESMAS PAMOTAN		2
190	TERAMPIL - PERAWAT	1	PUSKESMAS TIRTOYUDO		1
191	TERAMPIL - PERAWAT	4	PUSKESMAS AMPELGADING		4
192	TERAMPIL - PERAWAT	4	PUSKESMAS PONCOKUSUMO		4
193	TERAMPIL - PERAWAT	2	PUSKESMAS TUREN		2
194	TERAMPIL - PERAWAT	1	PUSKESMAS GONDANGLEGI		1
195	TERAMPIL - PERAWAT	2	PUSKESMAS KETAWANG		2
196	TERAMPIL - PERAWAT	3	PUSKESMAS KEPANJEN		3
197	TERAMPIL - PERAWAT	1	PUSKESMAS SUMBERPUCUNG		1
198	TERAMPIL - PERAWAT	2	PUSKESMAS KROMENGAN		2
199	TERAMPIL - PERAWAT	1	PUSKESMAS NGAJUM		1
200	TERAMPIL - PERAWAT	2	PUSKESMAS WONOSARI		2
201	TERAMPIL - PERAWAT	1	PUSKESMAS WAGIR		1
202	TERAMPIL - PERAWAT	3	PUSKESMAS PAKISAJI		3
203	TERAMPIL - PERAWAT	2	PUSKESMAS TAJINAN		2
204	TERAMPIL - PERAWAT	1	PUSKESMAS PAKIS		1
205	TERAMPIL - PERAWAT	2	PUSKESMAS LAWANG		2
206	TERAMPIL - PERAWAT	1	PUSKESMAS SINGOSARI		1
207	TERAMPIL - PERAWAT	1	PUSKESMAS ARDIMULYO		1
208	TERAMPIL - PERAWAT	3	PUSKESMAS KARANGPLOSO		3
209	TERAMPIL - PERAWAT	2	PUSKESMAS DAU		2
210	TERAMPIL - PERAWAT	2	PUSKESMAS PUJON		2
211	TERAMPIL - PERAWAT	1	PUSKESMAS NGANTANG		1
212	TERAMPIL - PERAWAT	2	PUSKESMAS KASEMBON		2
213	TERAMPIL - PERAWAT	12	RSUD KANJURUHAN KEPANJEN		12
214	TERAMPIL - PERAWAT	1	RSUD LAWANG		1
215	TERAMPIL - PERAWAT	23	RSUD NGANTANG		23
216	TERAMPIL - PERAWAT	1	PUSKESMAS DONOMULYO		1
217	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	PUSKESMAS KALIPARE		1
218	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	PUSKESMAS WAGIR		1
219	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	PUSKESMAS PAKISAJI		1
220	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	PUSKESMAS JABUNG		1
221	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	PUSKESMAS SINGOSARI		1
222	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	PUSKESMAS NGANTANG		1
223	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	PUSKESMAS KASEMBON		1
224	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	RSUD LAWANG		1
225	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	2	LAB. KES DAERAH KAB. MALANG	1	1
226	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	PUSKESMAS DONOMULYO	1	
227	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	PUSKESMAS KALIPARE		1
228	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	PUSKESMAS SITIARJO	1	
229	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	PUSKESMAS WAJAK		1
230	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	UPT PUSKESMAS PAGELARAN		1
231	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	PUSKESMAS KEPANJEN		1
232	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	PUSKESMAS DAU		1
233	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	PUSKESMAS NGANTANG		1
234	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	PUSKESMAS KASEMBON		1
235	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	2	RSUD NGANTANG	1	1
236	TERAMPIL - RADIOGRAFER	2	RSUD LAWANG		2
237	TERAMPIL - RADIOGRAFER	2	RSUD NGANTANG	1	1
238	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	5	FASYANKES LAINNYA UPT PENGUJIAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN	4	1
239	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	1	RSUD NGANTANG	1	
240	TERAMPIL - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	2	RSUD LAWANG		2
241	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	DINAS KESEHATAN KAB. MALANG	1	
242	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	PUSKESMAS BANTUR	1	
243	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	PUSKESMAS WONOKERTO	1	
244	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	PUSKESMAS GEDANGAN		1
245	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	PUSKESMAS SITIARJO	1	
246	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	PUSKESMAS DAMPIT	1	
247	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	PUSKESMAS PAMOTAN	1	
248	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	PUSKESMAS TIRTOYUDO	1	
249	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	PUSKESMAS AMPELGADING	1	
250	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	PUSKESMAS WAJAK	1	
251	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	PUSKESMAS GONDANGLEGI	1	
252	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	PUSKESMAS KETAWANG	1	
253	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	UPT PUSKESMAS PAGELARAN		1
254	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	1	
255	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	PUSKESMAS NGAJUM	1	

TENAGA KESEHATAN

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	JENIS	
				UMUM	KHUSUS
256	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	PUSKESMAS WONOSARI	1	
257	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	PUSKESMAS WAGIR	1	
258	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	PUSKESMAS PAKIS	1	
259	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	PUSKESMAS SINGOSARI		1
260	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	PUSKESMAS ARDIMULYO	1	
261	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	PUSKESMAS PUJON	1	
262	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	PUSKESMAS NGANTANG	1	
263	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	RSUD NGANTANG	1	
264	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	PUSKESMAS DONOMULYO	1	
265	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	PUSKESMAS KALIPARE	1	
266	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	PUSKESMAS PAMOTAN	1 *)	
267	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	PUSKESMAS TIRTOYUDO	1	
268	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	PUSKESMAS WAJAK	1	
269	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	1 *)	
270	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	PUSKESMAS KROMENGAN	1	
271	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	PUSKESMAS NGAJUM	1	
272	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	PUSKESMAS WONOSARI	1	
273	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	PUSKESMAS KARANGPLOSO	1 *)	
	TOTAL	446		123	323

Catatan :

Kualifikasi Pendidikan bagi Tenaga Kesehatan merujuk pada 14.Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan

Tanda *) Formasi Khusus Disabilitas

TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PENDIDIKAN	JENIS	
					UMUM	KHUSUS
1	AHLI PERTAMA - ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF	1	BUPATI MALANG , DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN , BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA	S-1 HOSPITALITI DAN PARIWISATA / D-IV KEPARIWISATAAN / D-IV DESTINASI PARIWISATA / D-IV PARIWISATA / D-IV MANAJEMEN KEPARIWISATAAN / D-IV MANAJEMEN PARIWISATA / D-IV PERHOTELAN / S-1 DESTINASI PARIWISATA / S-1 PARIWISATA / S-1 MANAJEMEN PERHOTELAN DAN PARIWISATA		1
2	AHLI PERTAMA - ANALIS AKUAKULTUR	1	BUPATI MALANG , DINAS PERIKANAN , BIDANG PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	S-1 SUMBER DAYA PERAIRAN / S-1 PERIKANAN BUDIDAYA / D-IV ANALIS KIMIA / D-IV BIOLOGI / D-IV TEKNOLOGI AKUAKULTUR / S-1 BUDIDAYA PERIKANAN / S-1 AKUAKULTUR / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN / S-1 BUDIDAYA PERAIRAN / S-1 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA / S-1 KIMIA / S-1 BIOLOGI / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / S-1 LINGKUNGAN		1
3	AHLI PERTAMA - ANALIS AKUAKULTUR	1	BUPATI MALANG , DINAS PERIKANAN , BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	S-1 SUMBER DAYA PERAIRAN / S-1 PERIKANAN BUDIDAYA / D-IV ANALIS KIMIA / D-IV BIOLOGI / D-IV TEKNOLOGI AKUAKULTUR / S-1 BUDIDAYA PERIKANAN / S-1 AKUAKULTUR / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN / S-1 BUDIDAYA PERAIRAN / S-1 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA / S-1 KIMIA / S-1 BIOLOGI / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / S-1 LINGKUNGAN		1
4	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	1	BUPATI MALANG , DIREKTUR RSUD LAWANG	D-IV ILMU HUKUM / S-1 ILMU HUKUM	1	
5	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	1	BUPATI MALANG , DIREKTUR RSUD KANJURUHAN KEPANJEN	D-IV ILMU HUKUM / S-1 ILMU HUKUM		1
6	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	1	BUPATI MALANG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH , BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	D-IV ILMU HUKUM / S-1 ILMU HUKUM		1
7	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	3	BUPATI MALANG , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	S-1 TEKNIK KESELAMATAN / D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG / D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL / S-1 REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN / D-IV TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG / D-IV TEKNIK LISTRIK INDUSTRI / D-IV TEKNIK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 PLANOLOGI	1	2
8	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	2	BUPATI MALANG , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	D-IV ILMU HUKUM / D-IV TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 SOSIOLOGIS / D-IV MANAJEMEN / D-IV PSIKOLOGI / D-IV TEKNIK GEOLOGI / D-IV GEOGRAFI / D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV ARSITEKTUR / D-IV PLANOLOGI / D-IV TEKNIK SIPIL / D-IV STATISTIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI / D-IV SOSIOLOGI / D-IV ILMU KESEHATAN MASYARAKAT / D-IV ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 ILMU HUKUM / S-1 PSIKOLOGI / S-1 STATISTIK / S-1 GEOGRAFI / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 PLANOLOGI		2
9	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	1	BUPATI MALANG , DINAS PERTANAHAN	D-IV ILMU HUKUM / D-IV EKONOMI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / D-IV ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 EKONOMI / S-1 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK		1
10	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	1	BUPATI MALANG , DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA , BIDANG KEPEMUDAAN	D-IV MANAJEMEN / D-IV ILMU HUKUM / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / D-IV EKONOMI / D-IV ILMU ADMINISTRASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / D-IV SOSIAL DAN POLITIK / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 SOSIAL DAN POLITIK		1

TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PENDIDIKAN	JENIS	
					UMUM	KHUSUS
11	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	1	BUPATI MALANG , BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK , BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	D-IV MANAJEMEN / D-IV ILMU HUKUM / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / D-IV EKONOMI / D-IV ILMU ADMINISTRASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / D-IV SOSIAL DAN POLITIK / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 SOSIAL DAN POLITIK		1
12	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	2	BUPATI MALANG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH , BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH	D-IV MANAJEMEN / D-IV ILMU HUKUM / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / D-IV EKONOMI / D-IV ILMU ADMINISTRASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / D-IV SOSIAL DAN POLITIK / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 SOSIAL DAN POLITIK	1 *)	1
13	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	1	BUPATI MALANG , BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	D-IV MANAJEMEN / D-IV ILMU HUKUM / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / D-IV EKONOMI / D-IV ILMU ADMINISTRASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / D-IV SOSIAL DAN POLITIK / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 SOSIAL DAN POLITIK		1
14	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	2	BUPATI MALANG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH , BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	D-IV MANAJEMEN / D-IV ILMU HUKUM / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / D-IV EKONOMI / D-IV ILMU ADMINISTRASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / D-IV SOSIAL POLITIK / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 SOSIAL DAN POLITIK	1	1
15	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	1	BUPATI MALANG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH , BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA SEKRETARIAT DAERAH	D-IV MANAJEMEN / D-IV ILMU HUKUM / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / D-IV EKONOMI / D-IV ILMU ADMINISTRASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / D-IV SOSIAL DAN POLITIK / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 SOSIAL DAN POLITIK		1
16	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	1	BUPATI MALANG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH , BAGIAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH	D-IV MANAJEMEN / D-IV ILMU HUKUM / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / D-IV LINGKUNGAN HIDUP / D-IV EKONOMI / D-IV ILMU ADMINISTRASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / D-IV SOSIAL DAN POLITIK / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 LINGKUNGAN HIDUP / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 SOSIAL DAN POLITIK		1
17	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	1	BUPATI MALANG , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	D-IV MANAJEMEN / D-IV ILMU HUKUM / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / D-IV EKONOMI / D-IV ILMU ADMINISTRASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / D-IV SOSIAL DAN POLITIK / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 SOSIAL DAN POLITIK		1
18	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	2	BUPATI MALANG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH , BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH	D-IV MANAJEMEN / D-IV ILMU HUKUM / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / D-IV EKONOMI / D-IV ILMU ADMINISTRASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / D-IV SOSIAL DAN POLITIK / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 SOSIAL DAN POLITIK	1	1
19	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	1	BUPATI MALANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	D-IV MANAJEMEN / D-IV ILMU HUKUM / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / D-IV LINGKUNGAN HIDUP / D-IV EKONOMI / D-IV ILMU ADMINISTRASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / D-IV SOSIAL DAN POLITIK / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 LINGKUNGAN HIDUP / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 SOSIAL DAN POLITIK		1

TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PENDIDIKAN	JENIS	
					UMUM	KHUSUS
20	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	2	BUPATI MALANG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH , BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH	D-IV MANAJEMEN / D-IV ILMU HUKUM / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / D-IV EKONOMI / D-IV ILMU ADMINISTRASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / D-IV SOSIAL DAN POLITIK / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 SOSIAL DAN POLITIK	1 *)	1
21	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	3	BUPATI MALANG , DINAS KETAHANAN PANGAN	S-1 ILMU PANGAN / S-1 ILMU GIZI/GIZI MASYARAKAT / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 ILMU PERTANIAN	1	2
22	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN	1	BUPATI MALANG , DINAS PERIKANAN , BIDANG PELAYANAN USAHA PERIKANAN	D-IV PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN / S-1 PERIKANAN BUDIDAYA / D-IV NAUTIKA PERIKANAN LAUT / D-IV PERIKANAN BUDIDAYA / D-IV SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / D-IV PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN / D-IV PENYULUHAN PERIKANAN / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN / D-IV PERMESINAN PERIKANAN / D-IV PERIKANAN TANGKAP / D-IV ILMU KELAUTAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN / S-1 PERMESINAN PERIKANAN / S-1 ILMU KELAUTAN / S-1 PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN / S-1 PERIKANAN TANGKAP / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / S-1 PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN		1
23	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	1	BUPATI MALANG , DINAS KETAHANAN PANGAN	S-1 ILMU PANGAN / D-IV AGROBISNIS / D-IV TEKNOLOGI PRODUKSI PANGAN / D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN / D-IV PERTANIAN / S-1 AGROBISNIS / S-1 AGROEKOTEKNOLOGI / S-1 PROTEKSI TANAMAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN / S-1 EKONOMI PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN PERTANIAN / S-1 PANGAN DAN NUTRISI / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERKEBUNAN / S-1 ILMU TANAH / S-1 AGRONOMI / S-1 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN / S-1 PERKEBUNAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 BIOLOGI / S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 TEKNIK HASIL PERTANIAN / S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN / S-1 AGROINDUSTRI		1
24	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	2	BUPATI MALANG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH , BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH	S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1	1
25	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1	BUPATI MALANG , DINAS PERTANAHAN	S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		1
26	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1	BUPATI MALANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		1
27	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1	BUPATI MALANG , DINAS SOSIAL , SEKRETARIAT	S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		1
28	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1	BUPATI MALANG , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI APARATUR	S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		1
29	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1	BUPATI MALANG , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG MUTASI DAN PROMOSI APARATUR	S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		1

TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PENDIDIKAN	JENIS	
					UMUM	KHUSUS
30	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1	BUPATI MALANG , DINAS PERIKANAN , SEKRETARIS	S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		1
31	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1	BUPATI MALANG , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN APARATUR	S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		1
32	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1	BUPATI MALANG , DINAS PENDIDIKAN , BIDANG TENAGA TEKNIS PENDIDIKAN	S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		1
33	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1	BUPATI MALANG , DINAS PENDIDIKAN , BIDANG TENAGA TEKNIS PENDIDIKAN , SEKSI TENAGA TEKNIS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN SEKOLAH DASAR	S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1 *)	
34	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1	BUPATI MALANG , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , SEKRETARIS	S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		1
35	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1	BUPATI MALANG , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , SEKRETARIAT , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		1
36	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1	BUPATI MALANG , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , SEKRETARIAT , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1 *)	
37	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1	BUPATI MALANG , DINAS PERHUBUNGAN , SEKRETARIS	S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		1
38	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	1	BUPATI MALANG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH , BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	D-IV MANAJEMEN / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV PERPUSTAKAAN / D-IV PERKANTORAN / D-IV KEARSIPAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 KEARSIPAN / S-1 PERKANTORAN / S-1 ADMINISTRASI KANTOR / S-1 ADMINSTRASI PUBLIK		1
39	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	1	BUPATI MALANG , DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	D-IV MANAJEMEN / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV PERPUSTAKAAN / D-IV KEARSIPAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 KEARSIPAN / S-1 ADMINISTRASI KANTOR	1	
40	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	1	BUPATI MALANG , DIREKTUR RSUD LAWANG	D-IV MANAJEMEN / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV PERPUSTAKAAN / D-IV PERKANTORAN / D-IV KEARSIPAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 KEARSIPAN / S-1 PERKANTORAN / S-1 ADMINISTRASI KANTOR		1
41	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	1	BUPATI MALANG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH , BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	D-IV MANAJEMEN / D-IV PERPUSTAKAAN / D-IV KEARSIPAN / D-IV ADMINISTRASI PERKANTORAN / S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN / S-1 KEARSIPAN	1	
42	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	1	BUPATI MALANG , BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK , SEKRETARIAT , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-IV PERPUSTAKAAN / D-IV KEARSIPAN / D-IV ADMINISTRASI PERKANTORAN / S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN / S-1 KEARSIPAN		1

TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PENDIDIKAN	JENIS	
					UMUM	KHUSUS
43	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	1	BUPATI MALANG , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , SEKRETARIAT , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-IV MANAJEMEN / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV PERPUSTAKAAN / D-IV PERKANTORAN / D-IV KEARSIPAN / D-IV ADMINISTRASI PERKANTORAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN / S-1 KEARSIPAN / S-1 PERKANTORAN / S-1 ADMINISTRASI KANTOR		1
44	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	1	BUPATI MALANG , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	D-IV MANAJEMEN / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV PERPUSTAKAAN / D-IV KEARSIPAN / D-IV ADMINISTRASI PERKANTORAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN / S-1 KEARSIPAN / S-1 PERKANTORAN / S-1 ADMINISTRASI KANTOR	1	
45	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	1	BUPATI MALANG , DINAS SOSIAL	D-IV KEARSIPAN DIGITAL / D-IV MANAJEMEN / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV PERPUSTAKAAN / D-IV PERKANTORAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 KEARSIPAN / S-1 PERKANTORAN / S-1 ADMINISTRASI KANTOR		1
46	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	1	BUPATI MALANG , DINAS PERHUBUNGAN , SEKRETARIAT	D-IV MANAJEMEN / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV PERPUSTAKAAN / D-IV PERKANTORAN / D-IV KEARSIPAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 KEARSIPAN / S-1 PERKANTORAN / S-1 ADMINISTRASI KANTOR		1
47	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	1	BUPATI MALANG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH , BAGIAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH	D-IV MANAJEMEN / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV PERPUSTAKAAN / D-IV PERKANTORAN / D-IV KEARSIPAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 KEARSIPAN / S-1 PERKANTORAN / S-1 ADMINISTRASI KANTOR		1
48	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	1	BUPATI MALANG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH , BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	D-IV MANAJEMEN / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV PERPUSTAKAAN / D-IV PERKANTORAN / D-IV KEARSIPAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 KEARSIPAN / S-1 PERKANTORAN / S-1 ADMINISTRASI KANTOR		1
49	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	1	BUPATI MALANG , DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA , BIDANG PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN	D-IV PERPUSTAKAAN / D-IV KEARSIPAN / D-IV ADMINISTRASI PERKANTORAN / S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN / S-1 KEARSIPAN		1
50	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	1	BUPATI MALANG , DINAS PERUMAHAN , KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA , SEKRETARIS	D-IV MANAJEMEN / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV PERPUSTAKAAN / D-IV PERKANTORAN / D-IV KEARSIPAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 KEARSIPAN / S-1 PERKANTORAN / S-1 ADMINISTRASI KANTOR		1
51	AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	2	BUPATI MALANG , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR	D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV MANAJEMEN BISNIS / D-IV MANAJEMEN PEMERINTAHAN / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 PSIKOLOGI / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1	1
52	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	4	BUPATI MALANG , DINAS SOSIAL	D-IV PEKERJAAN SOSIAL / D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 PEKERJAAN SOSIAL	1	3
53	AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	1	BUPATI MALANG , DINAS PERUMAHAN , KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA , BIDANG PENATAAN RUANG DAN PENATAAN BANGUNAN	D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG / D-IV ARSITEKTUR / D-IV TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG / D-IV JASA KONSTRUKSI / D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI / D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ARSITEKTUR		1

TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PENDIDIKAN	JENIS	
					UMUM	KHUSUS
54	AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	1	BUPATI MALANG , DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA, BIDANG PEMUKIMAN	D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI / D-IV ARSITEKTUR / D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 EKONOMI / D-IV JASA KONSTRUKSI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM / S-1 PLANOLOGI		1
55	AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	2	BUPATI MALANG , DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR / D-IV ARSITEKTUR / D-IV TEKNIK SIPIL / D-IV JASA KONSTRUKSI / D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ARSITEKTUR	1	1
56	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	BUPATI MALANG , DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA, BIDANG PENATAAN RUANG DAN PENATAAN BANGUNAN	D-IV ARSITEKTUR / D-IV TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNIK MESIN / D-IV TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 ARSITEKTUR / S-1 DESAIN INTERIOR / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 PLANOLOGI		1
57	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	BUPATI MALANG , DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA, BIDANG PERUMAHAN	D-IV ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 ARSITEKTUR / S-1 DESAIN INTERIOR / S-1 PLANOLOGI		1
58	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	1	BUPATI MALANG , DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA , BIDANG FASILITAS JALAN	D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI / D-IV MANAJEMEN PROYEK KONTRUKSI / D-IV REKAYASA SISTEM TRANSPORTASI JALAN / D-IV ARSITEKTUR / D-IV TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN / D-IV TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN / D-IV JASA KONSTRUKSI / D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI / D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN / D-IV REKAYASA JALAN DAN JEMBATAN / D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN / S-1 TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK MATERIAL / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN		1
59	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	1	BUPATI MALANG , DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA	D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI / D-IV MANAJEMEN PROYEK KONTRUKSI / D-IV REKAYASA SISTEM TRANSPORTASI JALAN / D-IV ARSITEKTUR / D-IV TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN / D-IV TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN / D-IV JASA KONSTRUKSI / D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI / D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN / D-IV REKAYASA JALAN DAN JEMBATAN / D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN / S-1 TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK MATERIAL / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN	1	
60	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	1	BUPATI MALANG , DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA , BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN	D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI / D-IV MANAJEMEN PROYEK KONTRUKSI / D-IV REKAYASA SISTEM TRANSPORTASI JALAN / D-IV ARSITEKTUR / D-IV TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN / D-IV TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN / D-IV JASA KONSTRUKSI / D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI / D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN / D-IV REKAYASA JALAN DAN JEMBATAN / D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN / S-1 TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK MATERIAL / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN		1
61	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	1	BUPATI MALANG , DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA , BIDANG PEMELIHARAAN	D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI / D-IV MANAJEMEN PROYEK KONTRUKSI / D-IV REKAYASA SISTEM TRANSPORTASI JALAN / D-IV ARSITEKTUR / D-IV TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN / D-IV TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN / S-1 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI / D-IV JASA KONSTRUKSI / D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI / D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN / D-IV REKAYASA JALAN DAN JEMBATAN / D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK MATERIAL / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN		1

TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PENDIDIKAN	JENIS	
					UMUM	KHUSUS
62	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN	1	BUPATI MALANG , DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA , BIDANG PEMUKIMAN	D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL / S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN / D-IV TEKNIK SIPIL / D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN		1
63	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PERUMAHAN	1	BUPATI MALANG , DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA , BIDANG PERUMAHAN	D-IV ARSITEKTUR / S-1 EKONOMI / S-1 ARSITEKTUR / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ADMINISTRASI NIAGA / S-1 ADMINISTRASI BISNIS		1
64	AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	1	BUPATI MALANG , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	D-IV MANAJEMEN BENCANA / S-1 MANAJEMEN BENCANA / D-IV MANAJEMEN / D-IV PSIKOLOGI / D-IV TEKNIK LINGKUNGAN / D-IV TEKNIK GEOLOGI / D-IV ILMU HUKUM / D-IV GEOGRAFI / D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV ARSITEKTUR / D-IV PLANOLOGI / D-IV TEKNIK SIPIL / D-IV STATISTIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI / D-IV SOSIOLOGI / D-IV ILMU KESEHATAN MASYARAKAT / D-IV ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 ILMU HUKUM / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIOLOGI / S-1 STATISTIK / S-1 GEOGRAFI / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 PLANOLOGI		1
65	AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	1	BUPATI MALANG , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	D-IV MANAJEMEN BENCANA / S-1 MANAJEMEN BENCANA / D-IV MANAJEMEN / D-IV PSIKOLOGI / D-IV TEKNIK LINGKUNGAN / D-IV TEKNIK GEOLOGI / D-IV ILMU HUKUM / D-IV GEOGRAFI / D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV ARSITEKTUR / D-IV PLANOLOGI / D-IV TEKNIK SIPIL / D-IV STATISTIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI / D-IV SOSIOLOGI / D-IV ILMU KESEHATAN MASYARAKAT / D-IV ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 ILMU HUKUM / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIOLOGI / S-1 STATISTIK / S-1 GEOGRAFI / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 PLANOLOGI	1	
66	AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	1	BUPATI MALANG , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	D-IV MANAJEMEN BENCANA / S-1 MANAJEMEN BENCANA / D-IV MANAJEMEN / D-IV PSIKOLOGI / D-IV TEKNIK LINGKUNGAN / D-IV TEKNIK GEOLOGI / D-IV ILMU HUKUM / D-IV GEOGRAFI / D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV ARSITEKTUR / D-IV PLANOLOGI / D-IV TEKNIK SIPIL / D-IV STATISTIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI / D-IV SOSIOLOGI / D-IV ILMU KESEHATAN MASYARAKAT / D-IV ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 ILMU HUKUM / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIOLOGI / S-1 STATISTIK / S-1 GEOGRAFI / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 PLANOLOGI		1
67	AHLI PERTAMA - PENATA RUANG	1	BUPATI MALANG , DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA , BIDANG PENATAAN RUANG DAN PENATAAN BANGUNAN	S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK GEODESI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 GEOGRAFI / S-1 PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 PLANOLOGI		1
68	AHLI PERTAMA - PENELITI	2	BUPATI MALANG , BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	S-2 ILMU PERIKANAN / S-2 ILMU MANAJEMEN / S-2 ILMU EKONOMI / S-2 ILMU PETERNAKAN / S-2 ILMU SOSIAL / S-2 ILMU PERTANIAN	1	1
69	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	2	BUPATI MALANG , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , UPT METROLOGI LEGAL	S-1 ILMU EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 PERTANIAN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM	1	1
70	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KOPERASI	1	BUPATI MALANG , DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO , BIDANG PENGAWASAN	D-IV MANAJEMEN / D-IV HUKUM / D-IV EKONOMI / D-IV AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM		1

TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PENDIDIKAN	JENIS	
					UMUM	KHUSUS
71	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KOPERASI	2	BUPATI MALANG , DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO , BIDANG KELEMBAGAAN	D-IV MANAJEMEN / D-IV HUKUM / D-IV EKONOMI / D-IV AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM	1	1
72	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KOPERASI	2	BUPATI MALANG , DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO , BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI	D-IV MANAJEMEN / D-IV HUKUM / D-IV EKONOMI / D-IV AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM	1	1
73	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KOPERASI	1	BUPATI MALANG , DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO , BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO	D-IV MANAJEMEN / D-IV HUKUM / D-IV EKONOMI / D-IV AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM		1
74	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	1	BUPATI MALANG , DINAS KETAHANAN PANGAN	S-1 ILMU PANGAN / D-IV AGROBISNIS / D-IV TEKNOLOGI PRODUKSI PANGAN / D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN / D-IV PERTANIAN / S-1 AGROBISNIS / S-1 AGROEKOTEKNOLOGI / S-1 PROTEKSI TANAMAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN / S-1 EKONOMI PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN PERTANIAN / S-1 PANGAN DAN NUTRISI / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERKEBUNAN / S-1 ILMU TANAH / S-1 AGRONOMI / S-1 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN / S-1 PERKEBUNAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 KIMIA / S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 BIOLOGI / S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 TEKNIK HASIL PERTANIAN / S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN / S-1 AGROINDUSTRI		1
75	AHLI PERTAMA - PENGELOLA KESEHATAN IKAN	1	BUPATI MALANG , DINAS PERIKANAN	S-1 SUMBER DAYA PERAIRAN / S-1 PERIKANAN BUDIDAYA / D-IV FARMASI / D-IV BIOLOGI / D-IV TEKNOLOGI AKUAKULTUR / D-IV KIMIA / S-1 BUDIDAYA PERIKANAN / S-1 AKUAKULTUR / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN / S-1 FARMASI / S-1 BUDIDAYA PERAIRAN / S-1 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA / S-1 KIMIA / S-1 BIOLOGI / S-1 LINGKUNGAN		1
76	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	2	BUPATI MALANG , DINAS PERIKANAN	D-IV TEKNIK PERKAPALAN / D-IV AKUAKULTUR / D-IV MESIN PERIKANAN / D-IV PENANGKAPAN IKAN / D-IV PERIKANAN / D-IV TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN / D-IV TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN / D-IV TEKNOLOGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERAIRAN / S-1 TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL KELAUTAN / S-1 KELAUTAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN / S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERAIRAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN / S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN / S-1 TEKNIK PERKAPALAN / S-1 PERKAPALAN / S-1 TEKNOLOGI PENANGKAPAN	1	1
77	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	1	BUPATI MALANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG TATA LINGKUNGAN	S-1 BIOLOGI / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 KIMIA / S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN		1
78	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	1	BUPATI MALANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	S-1 BIOLOGI / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 KIMIA / S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN		1
79	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	1	BUPATI MALANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	S-1 BIOLOGI / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 KIMIA / S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN		1
80	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	1	BUPATI MALANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	S-1 BIOLOGI / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 KIMIA / S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	
81	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	6	BUPATI MALANG , DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	D-IV BIOLOGI / D-IV ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN / S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN / S-1 BIOLOGI	1	5

TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PENDIDIKAN	JENIS	
					UMUM	KHUSUS
82	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	1	BUPATI MALANG , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , BIDANG PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU HUKUM / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU POLITIK		1
83	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	1	BUPATI MALANG , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU HUKUM / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU POLITIK		1
84	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	3	BUPATI MALANG , DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU POLITIK	1	2
85	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	3	BUPATI MALANG , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU HUKUM / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU POLITIK	1	2
86	AHLI PERTAMA - PENYULUH HUKUM	2	BUPATI MALANG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH , BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	D-IV ILMU HUKUM / S-1 ILMU HUKUM	1	1
87	AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	3	BUPATI MALANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	S-1 PSIKOLOGI MASYARAKAT / S-1 FISILOGI / S-1 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT / S-1 KESEJAHTERAAN LINGKUNGAN / S-1 EKOLOGI / S-1 AGROBISNIS / S-1 MIKROBIOLOGI / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 ILMU BIOLOGI / S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN / S-1 KEHUTANAN / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 BIOLOGI TERAPAN / S-1 AGRONOMI / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 KIMIA / S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 BOKIMIA / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 SOSIOLOGI / S-1 BIOLOGI / S-1 ILMU PERTANIAN	1	2
88	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	4	BUPATI MALANG , DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN , BIDANG PRASARANA SARANA DAN PENYULUHAN	D-IV AGROBISNIS HORTIKULTURA / S-1 MANAJEMEN AGROBISNIS / D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN / D-IV PENYULUH PERTANIAN / S-1 AGROBISNIS / D-IV SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN / S-1 AGROEKOTEKNOLOGI / S-1 PROTEKSI TANAMAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN / S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN / S-1 TANAMAN PANGAN / S-1 ILMU TANAH / S-1 AGRONOMI / S-1 PENYULUH PERTANIAN / S-1 MEKANISASI PERTANIAN / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 PEMULIAAN TANAMAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN / S-1 PERKEBUNAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 AGROTEKNOLOGI	1	3
89	AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL	1	BUPATI MALANG , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	D-IV PEKERJAAN SOSIAL / D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 PEKERJAAN SOSIAL		1
90	AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL	1	BUPATI MALANG , DINAS SOSIAL , BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	D-IV PEKERJAAN SOSIAL / D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 PEKERJAAN SOSIAL		1
91	AHLI PERTAMA - PERENCANA	1	BUPATI MALANG , INSPEKTORAT , SEKRETARIS	D-IV HUMANIORA / D-IV SOSIAL / D-IV ILMU ALAM / S-1 SOSIAL / S-1 HUMANIORA / S-1 ILMU ALAM		1
92	AHLI PERTAMA - PERENCANA	1	BUPATI MALANG , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , SEKRETARIS	D-IV HUMANIORA / D-IV SOSIAL / D-IV ILMU ALAM / S-1 SOSIAL / S-1 HUMANIORA / S-1 ILMU ALAM		1
93	AHLI PERTAMA - PERENCANA	1	BUPATI MALANG , DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	D-IV HUMANIORA / D-IV SOSIAL / D-IV ILMU ALAM / S-1 SOSIAL / S-1 HUMANIORA / S-1 ILMU ALAM		1
94	AHLI PERTAMA - PERENCANA	1	BUPATI MALANG , DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA , SEKRETARIAT	D-IV HUMANIORA / D-IV SOSIAL / D-IV ILMU ALAM / S-1 SOSIAL / S-1 HUMANIORA / S-1 ILMU ALAM		1
95	AHLI PERTAMA - PERENCANA	1	BUPATI MALANG , DINAS PERTANAHAN	D-IV HUMANIORA / D-IV SOSIAL / D-IV ILMU ALAM / S-1 SOSIAL / S-1 HUMANIORA / S-1 ILMU ALAM		1
96	AHLI PERTAMA - PERENCANA	1	BUPATI MALANG , DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR , SEKRETARIAT	D-IV HUMANIORA / D-IV SOSIAL / D-IV ILMU ALAM / S-1 SOSIAL / S-1 HUMANIORA / S-1 ILMU ALAM	1	

TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PENDIDIKAN	JENIS	
					UMUM	KHUSUS
97	AHLI PERTAMA - PERENCANA	1	BUPATI MALANG , DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO , SEKRETARIAT	D-IV HUMANIORA / D-IV SOSIAL / D-IV ILMU ALAM / S-1 SOSIAL / S-1 HUMANIORA / S-1 ILMU ALAM		1
98	AHLI PERTAMA - PERENCANA	1	BUPATI MALANG , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , SEKRETARIAT	D-IV HUMANIORA / D-IV SOSIAL / D-IV ILMU ALAM / S-1 SOSIAL / S-1 HUMANIORA / S-1 ILMU ALAM		1
99	AHLI PERTAMA - PERENCANA	1	BUPATI MALANG , DINAS KETAHANAN PANGAN , SEKRETARIS	D-IV HUMANIORA / D-IV SOSIAL / D-IV ILMU ALAM / S-1 SOSIAL / S-1 HUMANIORA / S-1 ILMU ALAM		1
100	AHLI PERTAMA - PERENCANA	1	BUPATI MALANG , BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH , SEKRETARIAT	D-IV SOSIAL / D-IV ILMU ALAM / S-1 SOSIAL / S-1 HUMANIORA / S-1 ILMU ALAM	1	
101	AHLI PERTAMA - PERENCANA	2	BUPATI MALANG , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , SEKRETARIAT	D-IV HUMANIORA / D-IV SOSIAL / D-IV ILMU ALAM / S-1 SOSIAL / S-1 HUMANIORA / S-1 ILMU ALAM	1	1
102	AHLI PERTAMA - PERENCANA	1	BUPATI MALANG , DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA , SEKRETARIS	D-IV HUMANIORA / D-IV SOSIAL / D-IV ILMU ALAM / S-1 SOSIAL / S-1 HUMANIORA / S-1 ILMU ALAM		1
103	AHLI PERTAMA - PERENCANA	1	BUPATI MALANG , DINAS PENDIDIKAN , SEKRETARIS	D-IV SOSIAL / D-IV ILMU ALAM / S-1 SOSIAL / S-1 HUMANIORA / S-1 ILMU ALAM		1
104	AHLI PERTAMA - PERENCANA	1	BUPATI MALANG , DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN , SEKRETARIAT	D-IV HUMANIORA / D-IV SOSIAL / D-IV ILMU ALAM / S-1 SOSIAL / S-1 HUMANIORA / S-1 ILMU ALAM		1
105	AHLI PERTAMA - PERENCANA	1	BUPATI MALANG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH , BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	D-IV HUMANIORA / D-IV SOSIAL / D-IV ILMU ALAM / S-1 SOSIAL / S-1 HUMANIORA / S-1 ILMU ALAM		1
106	AHLI PERTAMA - PERENCANA	1	BUPATI MALANG , DIREKTUR RSUD KANJURUHAN KEPANJEN	D-IV HUMANIORA / D-IV SOSIAL / D-IV ILMU ALAM / S-1 SOSIAL / S-1 HUMANIORA / S-1 ILMU ALAM	1	
107	AHLI PERTAMA - PERENCANA	1	BUPATI MALANG , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	D-IV HUMANIORA / D-IV SOSIAL / D-IV ILMU ALAM / S-1 SOSIAL / S-1 HUMANIORA / S-1 ILMU ALAM		1
108	AHLI PERTAMA - PERENCANA	1	BUPATI MALANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	D-IV SEMUA JURUSAN / S-1 SEMUA JURUSAN		1
109	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	1	BUPATI MALANG , DIREKTUR RSUD LAWANG	D-IV ILMU KOMUNIKASI / D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT / D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-IV JURNALISTIK / D-IV MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 JURNALISTIK / S-1 BROADCASTING / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / D-IV BROADCASTING		1
110	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	1	BUPATI MALANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	D-IV ILMU KOMUNIKASI / D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT / D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-IV JURNALISTIK / D-IV MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 JURNALISTIK / S-1 BROADCASTING / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / D-IV BROADCASTING		1
111	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	1	BUPATI MALANG , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	D-IV ILMU KOMUNIKASI / D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT / D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-IV JURNALISTIK / D-IV MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 JURNALISTIK / S-1 BROADCASTING / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / D-IV BROADCASTING		1
112	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	1	BUPATI MALANG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH , BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH	D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 REKAYASA PIRANTI LUNAK / D-IV REKAYASA PIRANTI LUNAK / S-1 SAINS DATA / D-IV TEKNIK KOMPUTER / D-IV KOMPUTASI STATISTIK / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA / D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 INFORMATIKA		1

TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PENDIDIKAN	JENIS	
					UMUM	KHUSUS
113	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	2	BUPATI MALANG , DINAS SOSIAL , SEKRETARIAT	D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 REKAYASA PIRANTI LUNAK / D-IV REKAYASA PIRANTI LUNAK / S-1 SAINS DATA / D-IV TEKNIK KOMPUTER / D-IV KOMPUTASI STATISTIK / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA / D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 INFORMATIKA	1	1
114	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	2	BUPATI MALANG , DINAS PENDIDIKAN , SEKRETARIS	D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 REKAYASA PIRANTI LUNAK / D-IV REKAYASA PIRANTI LUNAK / S-1 SAINS DATA / D-IV TEKNIK KOMPUTER / D-IV KOMPUTASI STATISTIK / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA / D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 INFORMATIKA	1	1
115	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	1	BUPATI MALANG , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI APARATUR	D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 REKAYASA PIRANTI LUNAK / D-IV REKAYASA PIRANTI LUNAK / S-1 SAINS DATA / D-IV TEKNIK KOMPUTER / D-IV KOMPUTASI STATISTIK / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA / D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 INFORMATIKA		1
116	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	1	BUPATI MALANG , DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 REKAYASA PIRANTI LUNAK / D-IV REKAYASA PIRANTI LUNAK / S-1 SAINS DATA / D-IV TEKNIK KOMPUTER / D-IV KOMPUTASI STATISTIK / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA / D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 INFORMATIKA		1
117	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	1	BUPATI MALANG , INSPEKTORAT , SEKRETARIS	D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 REKAYASA PIRANTI LUNAK / D-IV REKAYASA PIRANTI LUNAK / S-1 SAINS DATA / D-IV TEKNIK KOMPUTER / D-IV KOMPUTASI STATISTIK / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA / D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 INFORMATIKA		1
118	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	1	BUPATI MALANG , DIREKTUR RSUD LAWANG	D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 REKAYASA PIRANTI LUNAK / D-IV REKAYASA PIRANTI LUNAK / S-1 SAINS DATA / D-IV TEKNIK KOMPUTER / D-IV KOMPUTASI STATISTIK / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA / D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 INFORMATIKA		1

TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PENDIDIKAN	JENIS	
					UMUM	KHUSUS
119	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	1	BUPATI MALANG , BADAN PENDAPATAN DAERAH , BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 REKAYASA PIRANTI LUNAK / D-IV REKAYASA PIRANTI LUNAK / S-1 SAINS DATA / D-IV TEKNIK KOMPUTER / D-IV KOMPUTASI STATISTIK / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA / D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 INFORMATIKA		1
120	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	2	BUPATI MALANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 REKAYASA PIRANTI LUNAK / D-IV REKAYASA PIRANTI LUNAK / S-1 SAINS DATA / D-IV TEKNIK KOMPUTER / D-IV KOMPUTASI STATISTIK / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA / D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 INFORMATIKA	1	1
121	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	1	BUPATI MALANG , DINAS PERTANAHAN	D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 REKAYASA PIRANTI LUNAK / D-IV REKAYASA PIRANTI LUNAK / S-1 SAINS DATA / D-IV TEKNIK KOMPUTER / D-IV KOMPUTASI STATISTIK / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA / D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 INFORMATIKA		1
122	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	2	BUPATI MALANG , BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 REKAYASA PIRANTI LUNAK / D-IV REKAYASA PIRANTI LUNAK / S-1 SAINS DATA / D-IV TEKNIK KOMPUTER / D-IV KOMPUTASI STATISTIK / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA / D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 INFORMATIKA	1	1
123	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	1	BUPATI MALANG , BADAN PENDAPATAN DAERAH	D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 REKAYASA PIRANTI LUNAK / D-IV REKAYASA PIRANTI LUNAK / S-1 SAINS DATA / D-IV TEKNIK KOMPUTER / D-IV KOMPUTASI STATISTIK / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA / D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 INFORMATIKA		1
124	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	2	BUPATI MALANG , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 REKAYASA PIRANTI LUNAK / D-IV REKAYASA PIRANTI LUNAK / S-1 SAINS DATA / D-IV TEKNIK KOMPUTER / D-IV KOMPUTASI STATISTIK / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA / D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 INFORMATIKA	1	1
125	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	1	BUPATI MALANG , BADAN PENDAPATAN DAERAH , BIDANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH	D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 REKAYASA PIRANTI LUNAK / D-IV REKAYASA PIRANTI LUNAK / S-1 SAINS DATA / D-IV TEKNIK KOMPUTER / D-IV KOMPUTASI STATISTIK / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA / D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 INFORMATIKA		1

TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PENDIDIKAN	JENIS	
					UMUM	KHUSUS
126	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	2	BUPATI MALANG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH , BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH	D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 REKAYASA PIRANTI LUNAK / D-IV REKAYASA PIRANTI LUNAK / S-1 SAINS DATA / D-IV TEKNIK KOMPUTER / D-IV KOMPUTASI STATISTIK / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA / D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 INFORMATIKA	1	1
127	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	1	BUPATI MALANG , DINAS PERHUBUNGAN	D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 REKAYASA PIRANTI LUNAK / D-IV REKAYASA PIRANTI LUNAK / S-1 SAINS DATA / D-IV TEKNIK KOMPUTER / D-IV KOMPUTASI STATISTIK / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA / D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 INFORMATIKA		1
128	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	2	BUPATI MALANG , DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 REKAYASA PIRANTI LUNAK / D-IV REKAYASA PIRANTI LUNAK / S-1 SAINS DATA / D-IV TEKNIK KOMPUTER / D-IV KOMPUTASI STATISTIK / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA / D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 INFORMATIKA	1	1
129	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	1	BUPATI MALANG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH , BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 REKAYASA PIRANTI LUNAK / D-IV REKAYASA PIRANTI LUNAK / S-1 SAINS DATA / D-IV TEKNIK KOMPUTER / D-IV KOMPUTASI STATISTIK / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA / D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 INFORMATIKA		1
130	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	3	BUPATI MALANG , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 REKAYASA PIRANTI LUNAK / D-IV REKAYASA PIRANTI LUNAK / S-1 SAINS DATA / D-IV TEKNIK KOMPUTER / D-IV KOMPUTASI STATISTIK / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA / D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 INFORMATIKA	1	2
131	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	48	BUPATI MALANG , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SLTA/SMA SEDERAJAT	8	40
132	PEMULA - PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN	2	BUPATI MALANG , DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA , BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN	SMK KONSTRUKSI JALAN, IRIGASI, DAN JEMBATAN / SMK TEKNIK MEKANIK INDUSTRI / SMK KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN / SMK TEKNIK GEOMATIKA / SMK TEKNIK ALAT BERAT / SMK TEKNIK GEOSPASIAL / SMK DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN / SMA IPA / SMK TEKNIK PEMESINAN		2
133	PEMULA - PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN	2	BUPATI MALANG , DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA , BIDANG PEMELIHARAAN	SMK KONSTRUKSI JALAN, IRIGASI, DAN JEMBATAN / SMK TEKNIK MEKANIK INDUSTRI / SMK KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN / SMK TEKNIK GEOMATIKA / SMK TEKNIK ALAT BERAT / SMK TEKNIK GEOSPASIAL / SMK DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN / SMA IPA / SMK TEKNIK PEMESINAN		2

TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PENDIDIKAN	JENIS	
					UMUM	KHUSUS
134	PEMULA - PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN	42	BUPATI MALANG , DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA	SMK KONSTRUKSI JALAN, IRIGASI, DAN JEMBATAN / SMK TEKNIK MEKANIK INDUSTRI / SMK KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN / SMK TEKNIK GEOMATIKA / SMK TEKNIK ALAT BERAT / SMK TEKNIK GEOSPASIAL / SMK DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN / SMA IPA / SMK TEKNIK PEMESINAN	8	34
135	PEMULA - PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN	3	BUPATI MALANG , DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA , BIDANG BINA TEKNIK	SMK KONSTRUKSI JALAN, IRIGASI, DAN JEMBATAN / SMK TEKNIK MEKANIK INDUSTRI / SMK KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN / SMK TEKNIK GEOMATIKA / SMK TEKNIK ALAT BERAT / SMK TEKNIK GEOSPASIAL / SMK DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN / SMA IPA / SMK TEKNIK PEMESINAN		3
136	PEMULA - PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN	2	BUPATI MALANG , DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA , BIDANG FASILITAS JALAN	SMK KONSTRUKSI JALAN, IRIGASI, DAN JEMBATAN / SMK TEKNIK MEKANIK INDUSTRI / SMK KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN / SMK TEKNIK GEOMATIKA / SMK TEKNIK ALAT BERAT / SMK TEKNIK GEOSPASIAL / SMK DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN / SMA IPA / SMK TEKNIK PEMESINAN		2
137	PEMULA - PENATA LAKSANA PENYEHATAN LINGKUNGAN	1	BUPATI MALANG , DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA , BIDANG PEMUKIMAN	SMK KONSTRUKSI GEDUNG DAN SANITASI / SMK TEKNIK KONSTRUKSI DAN PERUMAHAN / SMK DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN / SMA IPA		1
138	PEMULA - PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	6	BUPATI MALANG , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SMA/SEDERAJAT / SMK	1	5
139	TERAMPIL - ARSIPARIS	1	BUPATI MALANG , DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III SEKRETARIS / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III KOMUNIKASI / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN		1
140	TERAMPIL - ARSIPARIS	2	BUPATI MALANG , DINAS KESEHATAN , SEKRETARIAT , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III INFORMASI, PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III SEKRETARIS / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III KOMUNIKASI / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN	1	1
141	TERAMPIL - ARSIPARIS	1	BUPATI MALANG , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , SEKRETARIAT , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KOMUNIKASI / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN		1 *)
142	TERAMPIL - ARSIPARIS	1	BUPATI MALANG , BADAN PENDAPATAN DAERAH , BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III INFORMASI, PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III SEKRETARIS / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III KOMUNIKASI / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN	1	
143	TERAMPIL - ARSIPARIS	1	BUPATI MALANG , BADAN PENDAPATAN DAERAH , BIDANG PENAGIHAN, PEMERIKSAAN DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III INFORMASI, PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III SEKRETARIS / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III KOMUNIKASI / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN	1 *)	
144	TERAMPIL - ARSIPARIS	1	BUPATI MALANG , DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	D-III PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III INFORMASI / D-III SEKRETARIS / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III KOMUNIKASI / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN		1
145	TERAMPIL - ARSIPARIS	2	BUPATI MALANG , DINAS KESEHATAN , DIREKTUR RSUD NGANTANG , SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III INFORMASI, PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III SEKRETARIS / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III KOMUNIKASI / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN		2

TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PENDIDIKAN	JENIS	
					UMUM	KHUSUS
146	TERAMPIL - ARSIPARIS	1	BUPATI MALANG , DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA , SEKRETARIS	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III INFORMASI, PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III SEKRETARIS / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III KOMUNIKASI / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN		1
147	TERAMPIL - ARSIPARIS	2	BUPATI MALANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III INFORMASI, PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III SEKRETARIS / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III KOMUNIKASI / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN	1	1
148	TERAMPIL - ARSIPARIS	1	BUPATI MALANG , BADAN PENDAPATAN DAERAH , BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III INFORMASI, PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III SEKRETARIS / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III KOMUNIKASI / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN		1
149	TERAMPIL - ARSIPARIS	1	BUPATI MALANG , BADAN PENDAPATAN DAERAH , BIDANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III INFORMASI, PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III SEKRETARIS / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III KOMUNIKASI / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN	1	
150	TERAMPIL - ARSIPARIS	1	BUPATI MALANG , DINAS PERHUBUNGAN	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III SEKRETARIS / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III KOMUNIKASI / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN		1
151	TERAMPIL - ARSIPARIS	1	BUPATI MALANG , DINAS PERHUBUNGAN , SEKRETARIAT	D-III PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III INFORMASI / D-III SEKRETARIS / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III KOMUNIKASI / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN		1
152	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1	BUPATI MALANG , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	D-III DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III SISTEM INFORMASI		1
153	TERAMPIL - PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN	1	BUPATI MALANG , DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA , BIDANG BINA TEKNIK	D-III GAMBAR ARSITEKTUR / D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN / D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN, JEMBATAN, DAN BANGUNAN AIR / D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL / D-III TEKNIK SIPIL / D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-III TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI / D-III TEKNIK KELAUTAN / D-III TEKNIK GEOLOGI / D-III TEKNIK MESIN ALAT BERAT / D-III TEKNIK GEOMATIKA / D-III TEKNIK MESIN / D-III KONSTRUKSI SIPIL / D-III TEKNIK GEODESI / D-III TEKNIK ARSITEKTUR / D-III ARSITEKTUR		1
154	TERAMPIL - PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN	1	BUPATI MALANG , DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA , BIDANG FASILITAS JALAN	D-III GAMBAR ARSITEKTUR / D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN / D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN, JEMBATAN, DAN BANGUNAN AIR / D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL / D-III TEKNIK SIPIL / D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-III TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI / D-III TEKNIK KELAUTAN / D-III TEKNIK GEOLOGI / D-III TEKNIK MESIN ALAT BERAT / D-III TEKNIK GEOMATIKA / D-III TEKNIK MESIN / D-III KONSTRUKSI SIPIL / D-III TEKNIK GEODESI / D-III TEKNIK ARSITEKTUR / D-III ARSITEKTUR		1
155	TERAMPIL - PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN	1	BUPATI MALANG , DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA , BIDANG PEMELIHARAAN	D-III GAMBAR ARSITEKTUR / D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN / D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN, JEMBATAN, DAN BANGUNAN AIR / D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL / D-III TEKNIK SIPIL / D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-III TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI / D-III TEKNIK KELAUTAN / D-III TEKNIK GEOLOGI / D-III TEKNIK MESIN ALAT BERAT / D-III TEKNIK GEOMATIKA / D-III TEKNIK MESIN / D-III KONSTRUKSI SIPIL / D-III TEKNIK GEODESI / D-III TEKNIK ARSITEKTUR / D-III ARSITEKTUR		1

TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PENDIDIKAN	JENIS	
					UMUM	KHUSUS
156	TERAMPIL - PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN	1	BUPATI MALANG , DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA , BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN	D-III GAMBAR ARSITEKTUR / D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN / D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN, JEMBATAN, DAN BANGUNAN AIR / D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL / D-III TEKNIK SIPIL / D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-III TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI / D-III TEKNIK KELAUTAN / D-III TEKNIK GEOLOGI / D-III TEKNIK MESIN ALAT BERAT / D-III TEKNIK GEOMATIKA / D-III TEKNIK MESIN / D-III KONSTRUKSI SIPIL / D-III TEKNIK GEODESI / D-III TEKNIK ARSITEKTUR / D-III ARSITEKTUR		1
157	TERAMPIL - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	7	BUPATI MALANG , DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	D-III HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN / D-III BIOLOGI / D-III PERLINDUNGAN TANAMAN	1	6
158	TERAMPIL - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	1	BUPATI MALANG , DINAS PERHUBUNGAN , UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	D-III PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR		1
159	TERAMPIL - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	1	BUPATI MALANG , DINAS PERHUBUNGAN	D-III PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR		1
160	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	6	BUPATI MALANG , DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	D-III PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN / D-III PEMULIAAN TANAMAN / D-III HAMA PENYAKIT TUMBUHAN / D-III ILMU TANAH / D-III TANAMAN PANGAN / D-III MANAJEMEN AGROBISNIS / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN / D-III PROTEKSI TANAMAN / D-III AGROBISNIS / D-III TEKNIK PERTANIAN / D-III AGROEKOTEKNOLOGI / D-III AGROTEKNOLOGI / D-III AGRONOMI / D-III BUDIDAYA PERTANIAN / D-III PENYULUH PERTANIAN / D-III PERKEBUNAN / D-III SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / D-III MEKANISASI PERTANIAN	1	5
161	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	1	BUPATI MALANG , DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI		1
162	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	1	BUPATI MALANG , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI		1
163	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	1	BUPATI MALANG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH , BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI		1
164	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	7	BUPATI MALANG , DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI	1 *)	6
165	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	2	BUPATI MALANG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH , BAGIAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI	1	1
166	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	1	BUPATI MALANG , DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA , BIDANG PEMELIHARAAN	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI		1
167	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	1	BUPATI MALANG , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PENGELOLAAN PASAR DAN PEDAGANG KAKI LIMA	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI	1	
168	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	1	BUPATI MALANG , BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI		1
169	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	1	BUPATI MALANG , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERDAGANGAN	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI		1

TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PENDIDIKAN	JENIS	
					UMUM	KHUSUS
170	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	1	BUPATI MALANG , DINAS PERHUBUNGAN	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI		1
171	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	1	BUPATI MALANG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH , BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI		1
172	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	1	BUPATI MALANG , DINAS PEKERJAN UMUM BINA MARGA , SEKRETARIS	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI		1
173	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	1	BUPATI MALANG , DIREKTUR RSUD LAWANG	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI		1
174	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	1	BUPATI MALANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI		1
175	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	1	BUPATI MALANG , DINAS PERIKANAN	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI		1
176	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	1	BUPATI MALANG , DIREKTUR RSUD LAWANG	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI		1
177	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	1	BUPATI MALANG , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG INDUSTRI NON AGRO	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI	1 *)	
178	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	1	BUPATI MALANG , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG INDUSTRI AGRO	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI		1
179	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1	BUPATI MALANG , BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK , SEKRETARIAT , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK		1
180	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	2	BUPATI MALANG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH , BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1	1
181	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1	BUPATI MALANG , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI APARATUR	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK		1
182	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1	BUPATI MALANG , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , SEKRETARIAT , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK		1
183	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1	BUPATI MALANG , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN APARATUR	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK		1
184	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1	BUPATI MALANG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH , BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK		1

TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PENDIDIKAN	JENIS	
					UMUM	KHUSUS
185	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1	BUPATI MALANG , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG MUTASI DAN PROMOSI APARATUR	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK		1
186	TERAMPIL - SURVEYOR PEMETAAN	5	BUPATI MALANG , DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	D-III PENGELOLAAN LINGKUNGAN / D-III TEKNOLOGI GEOMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS / D-III TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH / D-III PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN / D-III TEKNOLOGI REKAYASA PENGINDERAAN JAUH / D-III SURVEI DAN PEMETAAN / D-III TEKNIK GEOMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III SISTEM INFORMASI	1	4
187	TERAMPIL - TEKNISI AKUAKULTUR	2	BUPATI MALANG , DINAS PERIKANAN	D-III PERIKANAN BUDIDAYA / D-III LINGKUNGAN / D-III BIOLOGI / D-III KIMIA		2
188	TERAMPIL - TEKNISI KESEHATAN IKAN	1	BUPATI MALANG , DINAS PERIKANAN	D-III PERIKANAN BUDIDAYA / D-III TEKNIK PENANGANAN PATOLOGI PERIKANAN / D-III LINGKUNGAN / D-III BIOLOGI / D-III KIMIA		1
TOTAL		358			72	286

Catatan :

Kualifikasi Pendidikan bagi Jabatan Ahli Pertama - Perencana berlaku rumpun pendidikan :

S-1/D-IV Rumpun Ilmu Alam (Fisika, Kimia, Biologi);

S-1/D-IV Rumpun Ilmu Sosial (Ilmu Komunikasi, Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, Periklanan, Televisi dan Film, Manajemen Komunikasi dan Media, Komunikasi Penyiaran Islam, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Sosiologi, Antropologi, Ilmu Sosiatri, Kependudukan (Demografi));

S-1/D-IV Rumpun Ilmu Humaniora (Humaniora, Ilmu Sejarah, Ilmu Hukum, Notariat, Kriminologi, Ilmu Kepolisian, Ketahanan Nasional, Studi Pembangunan, Kajian Wilayah, Kajian Budaya, Arkeologi)

Tanda *) Formasi Khusus Disabilitas



 Bupati MALANG
 Sekretaris Daerah
 Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah,

Dr. Ir. WAHYU HIDAYAT, M.M.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 196612171993031006

Malang, September 2023

Kepada
Yth. Bapak Bupati Malang
di
KEPANJEN

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
Tempat, tanggal lahir : Usia: tahun bulan.....
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)
Formasi yang dilamar : PPPK Tenaga Kesehatan/PPPK Teknis/PPPK Guru *)
Jabatan yang dilamar :
Kualifikasi Pendidikan :
Unit Kerja Penempatan :
Alamat sesuai KTP :
Nomor HP :

Bersama ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak Bupati Malang untuk mendaftar menjadi PPPK Tenaga Kesehatan/PPPK Teknis/PPPK Guru *) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan scan dokumen asli yang diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> terdiri dari:

1. Kartu Tanda Penduduk elektronik (eKTP) atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Pas foto formal, berwarna, tampak depan, terbaru, berlatar belakang warna merah polos, posisi potret;
3. Ijazah;
4. Transkrip nilai;
5. Surat pernyataan 5 (lima) poin bermeterai elektronik;
6. Surat pernyataan tidak pindah selama Masa Hubungan Perjanjian Kerja bermeterai elektronik;
7. Surat keterangan bukti pengalaman kerja sesuai persyaratan;
8. STR (khusus bagi pelamar formasi jabatan yang mensyaratkan);
9. Surat keterangan bukti disabilitas dari dokter (khusus bagi pelamar penyandang disabilitas);

Demikian surat permohonan ini dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat saya,

e-Meterai Rp.10.000

(Nama Lengkap)

Keterangan:

*) pilih salah satu

*) macam lampiran menyesuaikan dokumen yang diupload

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., September 2023

Yang membuat pernyataan,

e-meterai Rp.10.000

.....

**SURAT PERNYATAAN RENCANA PENEMPATAN
BERSEDIA TIDAK PINDAH KERJA SELAMA
MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Tempat tanggal lahir :

Program Studi, Tahun lulus :

Jabatan yang dilamar :

Unit kerja penempatan :

Alamat sesuai KTP :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Apabila saya diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Formasi Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Malang, bersedia mengabdikan pada unit kerja penempatan dan jabatan sesuai formasi dan tidak mengajukan pindah selama masa hubungan perjanjian kerja.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, apabila dikemudian hari saya tidak mematuhi surat pernyataan ini bersedia diberhentikan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Kabupaten Malang.

....., September 2023

Yang membuat pernyataan,

e-meterai Rp.10.000

.....

KOP INSTANSI

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA¹⁾

Nomor:

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja/Instansi :

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama :
Tempat & tanggal lahir :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

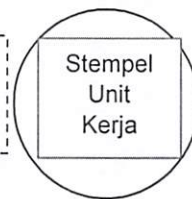
telah melaksanakan tugas sebagai (***jabatan yang relevan sesuai formasi yang dipilih***) selama tahun bulan, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal dan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya.

.....,..... September 2023

Jabatan²⁾

e-Materai
Rp. 10.000,-



ttd

Nama

1. Syarat Wajib
2. Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/Kepala Rumah Sakit /Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama /Pejabat Administrator /Direktur /Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia

FORMAT SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS

KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH / PUSKESMAS

SURAT KETERANGAN

Nama : _____ Jenis Kelamin: Laki / Perempuan *)
Umur : _____
NIK : _____
Ada Disabilitas : Ya / Tidak *)
Lokasi Disabilitas : _____

- Susunan syaraf pusat;
Sebutkan _____
- Organ Penginderaan;
Sebutkan _____
- Extremitas atas kanan/kiri/keduanya *)
- Tangan dominan kanan /kiri *)
- Extremitas bawah kanan/kiri
- Lain – Lain _____

ANAMNESIS)**

1. Riwayat disabilitas : - Sejak lahir, diagnosa _____
- Sesudah kecelakaan, pada tahun _____, diagnosa _____
- Sesudah sakit, pada tahun _____, diagnosa _____
2. Kemampuan mengurus diri *)
- Mampu
- Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa _____
- Perlu bantuan penuh orang lain
3. Bepergian keluar rumah:
- -Bisa sendiri /perlu diantar anggota keluarga*)

HASIL PEMERIKSAAN **)

4. Jenis Disabilitas :
a. Disabilitas Fisik
1) Amputasi (Tangan /Kaki)*)
2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah
3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
4) Cerebral Palsy (CP)
b. Disabilitas Sensorik
1) Netra
a) Buta total
b) Persepsi cahaya /low vision
2) Rungu
3) Wicara
c) Disabilitas Intelektual
4) Disabilitas grahita
5) Down syndrome
d) Disabilitas Mental
6) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas dan Gangguan Kepribadian *)
7) Disabilitas perkembangan (Autis /Hiperaktif) *)

5. Derajat Disabilitas Fisik :

- 1) Derajat 1 : mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan
2) Derajat 2 : mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu
3) Derajat 3 : mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain, dengan atau tanpa alat bantu
4) Derajat 4 : dalam melaksanakan aktivitas, tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain
5) Derajat 5 : tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus
6) Derajat 6 : tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.

6. Kemampuan Mobilitas:

1) Jalan /jalan perlahan /jalan dengan alat bantu /tidak mampu jalan*)

2) Naik tangga /naik tangga perlahan /tidak mampu naik tangga*)

7. Gangguan Extremitas atas : _____

1) Kanan : Kekuatan 5 /4 /3 /2 /1 /0

2) Kiri : kekuatan 5 /4 /3 /2 /1 /0

Gangguan Extremitas bawah : _____

1) Kanan : Kekuatan 5 /4 /3 /2 /1 /0

2) Kiri : kekuatan 5 /4 /3 /2 /1 /0

8. Alat bantu yang digunakan : Ada /Tidak*), sebutkan _____

9. Penyakit lain : Ada /Tidak*), sebutkan _____

10. Pengobatan : Ada /Tidak*), sebutkan _____

Catatan Tambahan lainnya :

Tempat dan Tanggal Pemeriksaan
Dokter yang memeriksa

Nama
NIP.

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**) Wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas